

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan (Nordiawan, 2006). Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai, dalam rangka implementasi urusan pemerintah sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi tersebut, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD disetiap akhir tahun dan diakhiri jabatan Kepala Pemerintah (Santoso dan Pambelum, 2008).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya

terciptanya good governance. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto dalam santoso, 2008). Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya laporan keuangan yang baik pusat maupun daerah, sudah seharusnya dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut menjadikannya sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem keuangan daerah yang *accountabel* dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban – kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal- hal yang menyangkut pertanggungjawabannya sebagai instrument untuk kegiatan

control terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik (Riantiarno dan Azlina, 2011).

Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang baik didasarkan pada kinerja akuntabilitas yang menyampaikan serta membuat laporan keuangan tersebut. Berdasarkan peraturan perundangan berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab (Pamungkas, 2012).

Riantiarno dan Azlina (2011) juga menjelaskan bahwa terselenggaranya pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju tatanan pemerintah yang demokratis.

Penyelenggaraan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Riantiarno dan Azlina, 2011).

Penelitian ini terkait dengan pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Ponorogo belum pernah dilakukan karena penelitian yang diangkat lebih banyak mengarah pada penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran serta penelitian mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum pernah dilakukan. Hal ini mendorong peneliti melakukan penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui penerapan akuntansi sektor publik yang baik oleh instansi pemerintah serta kualitas laporan keuangan yang optimal dari pihak internal maupun eksternal diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan- urusan pemerintah dapat optimal. Perbaikan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan good governance dapat diwujudkan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Ponorogo”**.

1.1.2 Perumusan Masalah

Uraian sebelumnya telah memberikan gambaran yang jelas bahwa ternyata pembahasan tentang pelaporan keuangan dan akuntabilitas pun menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini menguji pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan dan actual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisien dan efektivitas. Pembuatan laporan keuangan adalah akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo ?

- b. Bagaimana Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo ?
- c. Bagaimana Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo ?

1.1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo;
- b. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo;
- c. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo;

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Universitas

Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan untuk para pegawai akuntansi atau keuangan yang terlibat langsung dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang akuntansi sektor publik yang merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Diharapkan juga bagi pihak yang melakukan kualitas laporan keuangan agar dapat independen dalam melakukannya agar hasil didapatkan adalah hasil yang sesuai kejadian atau fakta yang ada.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

d. Bagi Penelitian yang akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi khususnya untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan

pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

